

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Dalam sebuah penulisan karya penelitian, salah satunya yaitu skripsi, tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar baru dihasilkan oleh seorang penulis maupun peneliti, dimana penelitian tersebut selalu tidak terlepas dari pengaruh penelitian yang telah ditulis atau diteliti sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis menyadari pentingnya melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan.

Pada bagian literatur reviu ini penulis memfokuskan kepada literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penulis membagi kedalam tiga kelompok pembahasan, diantaranya mengenai kebijakan luar negeri Donald Trump terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara, Kesepakatan JCPOA pada masa Barrack Obama dan Pengembangan Nuklir Iran dan diplomasi kepada IAEA.

Untuk penelitian pertama, membahas perihal kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Donald Trump penulis mengacu pada tulisan Muhammad Najeri Al Syahrinh dengan judul **“Donald Trump dan Reorientasi Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara”** dimana tulisan tersebut menjelaskan Kerjasama denuklirisasi AS dan Korea Utara yang tidak kunjung direspon oleh Korea Utara menuai asumsi bahwa ambisi Korea Utara untuk tetap mengembangkan program nuklir ini. Hal tersebut membuat Amerika Serikat merasa tidak diuntungkan mengingat kepentingan yang terus muncul akibat ambisi Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya.

Pilihan lain, Amerika Serikat menerapkan sikap represif. Amerika Serikat dapat menekan rezim Korea Utara dengan tindakan non-militer, yaitu dengan

menjatuhkan sanksi, kebijakan isolasi dan tekanan yang digunakan untuk memberi dampak kepada Korea Utara lebih besar daripada yang sejauh ini dilakukan. Opsi berikutnya adalah mendorong Tiongkok untuk memberikan sanksi ekonomi dan mendesak secara politis kepada Korea Utara. Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat harus terus-menerus mendesak Tiongkok agar dapat memanfaatkan kekuatan ekonominya atas Korea Utara terhadap Tiongkok yang bisa menjadi ujung tombak atas persoalan nuklir tersebut. Opsi selanjutnya yang dapat diterapkan Amerika Serikat ialah menggunakan aspek militer untuk menghambat program pengembangan senjata nuklir Korea Utara oleh rezim Kim Jong Un. Pendekatan tersebut menggunakan berbagai cara yang bersifat ancaman secara langsung dan bertujuan untuk rezim Korea Utara tersebut diganti. Donald Trump kerap kali menekankan bahwa aksi militer menentang rezim Kim Jong Un dan program pengembangan senjata nuklirnya agar menjadi skenario yang layak untuk dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun penggunaan aspek militer terhadap Korea Utara beresiko menimbulkan perang. Instabilitas keamanan, sosial, politik dan ekonomi akan tercipta apabila perang terjadi dan tidak hanya akan dirasakan oleh negara-negara di kawasan saja namun begitu pula negara-negara di sekitar kawasan.

Opsi terakhir ialah dengan cara perundingan langsung oleh Amerika Serikat bersama Pyongyang. Trump sudah menarik niatnya untuk tidak kembali menggunakan strategi yang pernah digunakan oleh Presiden Amerika Serikat sebelum-sebelumnya. Trump menambahkan bahwa dia mengajak serta membujuk pimpinan Korea Utara, Kim Jong-un, agar menghentikan program nuklirnya. Apabila Korea Utara hadir ke meja perundingan dan merancang koneksi bersama-sama, Amerika Serikat harus bisa menyelesaikan persoalan defisit keamanan rezim Kim Jong-un sekarang. Salah satu dari beberapa kemungkinan untuk

mewujudkannya adalah dengan mengikuti dan memenuhi permintaan Pyongyang agar dapat saling menjalankan kesepakatan damai di Korea Utara. Diyakini bahwa kesimpulan dari kesepakatan ini dapat menjadi satu langkah yang baik di kawasan, menyudahi sikap bermusuhan antar negara dapat mengurangi ketegangan dan memperbaiki situasi kawasan secara keseluruhan.

Perjanjian damai nampaknya adalah satu-satunya pilihan paling rasional bagi Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan defisit keamanan rezim Korea Utara sebagai alasan utama program senjata nuklir dengan jaminan keamanan formal. Pyongyang mengumumkan kesediaannya untuk menyudahi pengujian nuklir apabila Amerika Serikat mengiyakan langkah tersebut. Melihat kurangnya pilihan lain yang menjanjikan agar Washington harus memanfaatkan kesepakatan tersebut (Syahrin, 2018).

Untuk penelitian kedua, membahas program pengembangan nuklir Iran. Penulis mengacu kepada tulisan Hikmatul Akbar yang berjudul “**Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi kepada IAEA**” dimana dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Iran telah mengembangkan program nuklirnya sejak 1956 dan bekerjasama dengan Amerika Serikat. Kerjasama tersebut terwujud ditandai dengan dibangunnya pusat pengembangan dengan diberi nama *The Teheran Nuclear Resource Center* yang dioperasikan oleh *Atomic Energy Organization Of Iran* (AEO) di tahun 1974. Hubungan Amerika Serikat dan Iran menjadi tidak terlalu baik ketika kelompok oposisi Iran secara tegas menyatakan bahwa Iran secara diam-diam melakukan program pengayaan uranium di Natanz yang dilengkapi dengan bukti dari dokumentasi satelit. Melalui pernyataan tersebut, pemerintah Iran selanjutnya merespon bahwa program nuklir ini bertujuan damai dan mengizinkan pihak *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk dipersilahkan melakukan

inspeksi. Kendati begitu, Amerika Serikat bersikukuh menduga bahwa program pengembangan nuklir Iran bertujuan untuk mengembangkan senjata nuklir dan hal tersebut pula menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat terhadap Iran, sebab Amerika Serikat beranggapan bahwa ada 'usaha' Iran untuk membuat serta mengembangkan senjata nuklir.

Biarpun Iran dijatuhi sanksi dan embargo ekonomi, Presiden Iran kala itu Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) tetap menjaga konsistensinya terhadap tujuan pengembangan energi nuklir Iran. Ia tidak begitu saja menghentikan pengembangan nuklir Iran, sebab Ahmadinejad beranggapan bahwa negara harus sanggup memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Dengan pemanfaatan energi nuklir yang Iran miliki, Iran mampu untuk dapat menyanggupi kebutuhan masyarakatnya, diantara lain di bidang sains, industri, kedokteran dan pula tentunya sebagai pembangkit listrik. Energi nuklir yang dimanfaatkan dapat menghemat bermacam-macam pengeluaran dan energi nuklir, serta dapat pula mengurangi efek gas rumah kaca. Semenjak dijatuhi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, perekonomian Iran mengalami inflasi, tetapi hal tersebut menjadikan perekonomian Iran terpuruk. Sanksi yang didapatkan justru malah membuat Iran menjadi negara yang mandiri dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Selain itu, teknologi nuklir mempunyai bermacam kegunaan di bidang sipil. Lebih dari 16% listrik di dunia diproduksi oleh pembangkit listrik bertenaga nuklir. Hal lainnya, nuklir juga memiliki fungsi yang sangat dapat menunjang di bidang kedokteran, salah satunya di dalam proses diagnosa dan penyembuhan beberapa jenis penyakit. Lalu, energi nuklir juga bermanfaat di bidang industri pertanian dan pemenuhan bahan makanan. Ilmuwan-ilmuwan juga menemukan bahwa nuklir Iran

dapat memisahkan garam yang ada dalam kandungan air asin (Westinghorse 2010) (Akbar, 2012).

Untuk pembahasan ketiga, membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada masa Barrack Obama. Pada pembahasan ini penulis mengacu pada tulisan Bella Kusuma Gustina yang berjudul “**Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barrack Obama Terkait Program Nuklir Iran**” dimana dalam tulisan tersebut membahas pada periode kedua masa jabatan Presiden Obama, bersama kebijakannya terhadap program nuklir Iran, Amerika Serikat sukses membuat kesepakatan yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Dalam tulisan Milena Sterio dalam jurnal *Case Western Reserve Journal of International Law* yang berjudul “*President Obama’s Legacy : The Iran Nuclear Agreement*” membahas mengenai kebijakan JCPOA. Diawali dari pembahasan sanksi terhadap Iran, struktur kesepakatan, serta juga kerugian dan keuntungan dari kesepakatan tersebut. Berlandaskan perjanjian JCPOA, Iran tidak menolak untuk mengurangi produksi uraniumnya menjadi 98% selama 15 tahun. Menurut Sterio, kesepakatan tersebut menguntungkan bagi Iran untuk memulihkan ekonomi ataupun citra Iran di mata dunia internasional. Dari sudut pandang lain, Amerika Serikat pun diuntungkan sebab bertujuan untuk mengurangi pengayaan uranium Iran dan terciptanya pengawasan yang lebih terstruktur dari IAEA terhadap Iran bisa direalisasi (Sterio,2016).

Mengacu pada *Rational choice* oleh Allison dalam *Goods and Objectives* pembuat kebijakan pertama-tama menentukan tujuan negara dalam suatu isu (Alison,1971). Berdasarkan model pengambilan kebijakan Graham T. Allison itu, *goods and objectivs* Amerika Serikat pada isu program nuklir Iran yaitu mencoba

menghentikan Iran yang diduga oleh pihak-pihak internasional untuk membangun *Weapon of Mass Destruction* (WMD). Hal ini digagas agar dapat menstabilkan keamanan di wilayah Timur Tengah dan memudahkan Amerika Serikat untuk dapat leluasa melakukan berbagai kepentingannya di wilayah tersebut (El-Khawas, 2011).

Kebijakan Presiden Barrack Obama memutuskan untuk memilih menghentikan proliferasi nuklir yang menjadi kekhawatiran pihak internasional akan berujung pada WMD sebagai tujuan dan sikap Amerika Serikat. Setelah terciptanya inisiasi untuk mengupayakan perbaikan kerja sama Amerika Serikat dan Iran, muncul sebuah alternatif kebijakan baru. Presiden Barrack Obama membuat alternatif kebijakan dibawah naungan UNSC terkait dengan isu program nuklir Iran yaitu *Joint Comprehensive Plan Of Action* (JCPOA) atau dikenal dengan kesepakatan nuklir Iran. JCPOA adalah kesepakatan bersama antara Iran dan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, Tiongkok dan Jerman. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menanggulangi Iran agar tidak melakukan kegiatan pengembangan senjata nuklir (pemusnah massal) dan mengawasi Iran agar program tersebut hanya diperuntukan untuk sumber energi dengan tujuan damai. JCPOA merupakan sebuah pencapaian yang menorehkan sejarah karena sebelumnya belum pernah ada Presiden selain Presiden Barrack Obama yang memberika kesempatan dan kesepakatan seperti JCPOA ini dalam hal isu program nuklir Iran (Viswanathan,2016) (Agustina, 2019).

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk membantu mendapatkan jawaban atas pembahasan dalam aspek program nuklir Iran dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep, diantaranya konsep keamanan, konsep keamanan nasional, kepentingan

nasional, konsep politik luar negeri serta konsep kekuatan atau *power* yang akan membantu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan ini.

2.2.1 Keamanan

Dalam beragam literatur ilmu Hubungan Internasional, para sarjana Hubungan Internasional beranggapan bahwa konsep keamanan adalah sebuah “*contested concept*”. Pendekatan tradisional yang kerap didominasi oleh *mahzab* Realisme yang menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan suatu situasi dan kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kapabilitas sebuah negara untuk melindungi negaranya dari serangan militer yang asalnya dari lingkungan eksternal (*the absence of a military thread or with the protection of the natuional from external overthowor attack*) (Prof. Anak Agung Banyu Perwira, 2008).

Dalam buku Buzzan yang berjudul *People, State and Fear 2nd Edition* (1991:17) Bellamy berpendapat bahwa, keamanan merupakan kebebasan relatif bagi negara yang akan didapatkan melalui perang, yang bersandingan dengan ekspektasi tinggi bahwa sebagai pemenang perang pun belum tentu akan menjadi konsekuensi yang pasti terjadi. (Ikhromi, 2014) .

Meujuk kepada definisi dari konsep keamanan yang dikemukakan diatas, maka konsep keamanan ini berhubungan erat dengan judul skripsi penulis, karena ancaman keamanan yang dirasakan oleh Amerika Serikat terhadap program nuklir yang dikembangkan Iran yang diduga sebagai senjata nuklir. Sehingga Amerika Serikat pada masa Donald Trump mengecam keras dengan beberapa kebijakan luar negerinya yang bertujuan untuk menyudutkan Iran agar menghentikan program nuklirnya.

2.2.2 Keamanan Nasional

Konsep dari keamanan nasional merujuk kepada situasi atau kondisi dimana aspek-aspek pokok yang membentuk sebuah negara dalam hal kedaulatan, penduduk, wilayah, aspek ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi dan pula nilai-nilai hukum yang didalamnya dapat dijamin eksistensinya dan dapat menggerakkan fungsi sesuai tujuannya tanpa distraksi atau ancaman dari pihak internal maupun eksternal (Araf,2013). Konsep keamanan nasional adalah sebuah dasar yang digunakan oleh suatu negara untuk mempertahankan wilayah negaranya dari luar wilayahnya. Konsep keamanan nasional lebih mengacu pada kekuatan negara tersebut (Ikhromi, 2014).

Mengacu kepada definisi dari konsep keamanan nasional, penulis beranggapan bahwa konsep tersebut berkaitan dengan pembahasan dan judul skripsi yang diangkat. Sebab keadidayaannya Amerika Serikat beserta *super power*-nya ini menjadi ancaman dan gangguan bagi Iran dalam aspek keamanan nasional Iran. Dalam kasus pengembangan nuklir Iran yang disepakati oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya Barrack Obama dalam perjanjian JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Namun, pada masa pemerintahan presiden selanjutnya Donald Trump, dia membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan dan dugaan bahwa program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran bertujuan mengembangkan senjata nuklir. Dari situ, Donald Trump kembali memberikan sanksi embargo ekonomi kepada Iran dengan jaminan Iran harus memberhentikan program nuklirnya. Bagi Iran, hal tersebut tentu saja mengganggu kestabilan keamanan nasional Iran, tidak hanya dalam aspek pengembangan nuklir (sumber energi cadangan) namun juga dalam aspek ekonomi.

2.2.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah konsepsi yang terbilang umum, namun merupakan unsur yang dapat menjadi kebutuhan yang vital bagi sebuah negara. Tujuan dasar dan faktor paling menentukan yang dapat mengarahkan para pembuat keputusan dalam merancang politik luar negeri untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional adalah salah satu dari beberapa tujuan yang ingin diwujudkan berkaitan dengan kepentingan, kebutuhan dan keperluan bangsa atau negara atau yang berhubungan dengan hal yang dicita-citakan. “Kepentingan nasional merupakan kebutuhan dan keinginan-keinginan dalam berhubungan dalam negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya.” (Jack C. Plano, and Roy Olton, 1999). Konsepsi kepentingan nasional didalamnya dikenal sebuah perspektif yang disebut realis (*realis perspective*). Perspektif ini berasumsi bahwa negara adalah aktor utama dalam politik internasional. Negara merupakan aktor rasional dimana kebijakan luar negeri diputuskan berlandaskan kepentingan dan tujuan nasional. Kesimpulannya adalah realis memandang kebijakan luar negeri sebagai refleksi kepentingan dan tujuan nasional (Putera, 2017)

Dalam kaitannya dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, dalam kasus Amerika Serikat dan Iran penulis menemukan bahwa ada kepentingan nasional Amerika di kawasan Timur tengah dan menganggap bahwa Iran adalah sebuah hambatan dan ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Merujuk kepada tiga kepentingan utama di kawasan Timur Tengah. Pertama, kepentingan jangka panjang. Kepentingan jangka panjang Amerika Serikat ialah untuk mengamankan jalur minyak dari kawasan Teluk Persia ke Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Kedua, untuk memastikan agar aktor negara ataupun aktor bukan negara di sekitar kawasan Timur Tengah tidak mengembangkan, memperoleh atau menggunakan

senjata pemusnah massal atau *weapon of mass destruction*. Ketiga, membantu kawasan tersebut agar tidak menjadi tempat, panggung aksi, pengekspor ekstrimis Islam yang dalam aksinya menggunakan dan mengandalkan kekerasan. Ekstrimis Islam yang dimaksud disini ialah kelompok-kelompok yang berusaha menegakkan kembali negara islam.

2.2.4 Politik Luar Negeri

Pada dasarnya politik luar negeri merupakan "*action theory*" atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mewujudkan suatu kepentingan tersebut. Dalam kajian hubungan internasional, konsep politik luar negeri dilihat sebagai suatu sistem rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal sebagai input yang memberi pengaruh kepada politik luar negeri sebuah negara dipersepsikan oleh para penentu keputusan dalam suatu proses konversi yang menjadi output.

Menurut Rosenan, kebijakan luar negeri merupakan upaya dari suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya dengan tujuan mengatasi dan mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.

Sementara itu Plato mengungkapkannya bahwa setiap kebijakan luar negeri dirumuskan agar dapat memenuhi tujuan nasional. Hal tersebut merupakan proses dari formulasi konkret dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap keadaan internasional yang tengah berlangsung .

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*value*) yang menjadi fokus dan tujuan para pengambil keputusan.
2. Jangka waktu yang diperlukan agar dapat mencapai fokus utama yaitu tujuan yang telah ditargetkan. Dengan kata lain, ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*), dan jangka panjang (*long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Berkaitan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis, konsep dari politik luar negeri ini sangat lekat dengan judul skripsi yang ditulis. Karena dampak kebijakan luar negeri yang dilontarkan Amerika Serikat merupakan output dari input tujuan nasional Amerika Serikat.

2.2.5 Power

Power adalah konsep yang kerap kali digunakan dalam ranah politik dan juga dalam lingkup hubungan internasional. Akan tetapi, hingga detik ini definisi mengenai konsep *power* itu masih menjadi perdebatan. Secara harfiah, *power* berarti kekuatan atau kekuasaan. Menurut Nicholas J. Spykman *power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk dapat menggerakkan manusia agar terbiasa dengan kebiasaan yang diinginkan oleh pemilik *power* dengan cara persuasi dan paksaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, *power* dapat dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan seperti paksaan dan dengan cara kooperatif seperti persuasi. Disamping itu Hans J. Morgenthau, lebih suka mendefinisikan *power* sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol atau mengendalikan pemikiran serta tindakan Aktor B.

Power terdiri dari segala sesuatu yang dipunyai manusia agar dapat menentukan dan memelihara kekuasaan dan kontrol atas orang lain dan itu (*Power*) mencakup seluruh hubungan sosial, mulai dari kekerasan psikologis yang tidak

terlihat melalui mana seseorang bisa mengontrol orang lain. (Morgenthau, 1973:9)
(Kresna, 2017).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah disebutkan, penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis atau dapat disebut juga anggapan dasar merupakan jawaban sementara dari masalah yang bersifat praduga, sebab masih harus dibuktikan kebenarannya. Berikut adalah hipotesis yang diangkat dari penelitian ini, yaitu:

”Adanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mengundurkan diri dari kesepakatan JCPOA, maka berimbas kepada pemberlakuan sanksi kembali pada sektor minyak Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah”

2.5 Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk menunjang penelitian lebih lanjut, maka dari itu penulis menyusun Verifikasi Variabel dan Indikator agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis sesuai dengan tolak ukur mengikuti konsep teoritik. Verifikasi variabel dan indikator pembentukan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

Variabel daam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Variabel (Analisis)
Variabel Bebas : Pengunduran dri Amerika Serikat dari kesepakatan JCPOA	1.Kebijakan Luar Negeri	1. Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan untuk mencabut dan keluar dari kesepakatan JCPOA atau biasa

		<p>disebut perjanjian nuklir Iran yang telah disepakati pada masa jabatan presiden Amerika Serikat sebelumnya, yaitu Barrack Obama.</p> <p>Sumber : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211130134934-120-727896/pengayaan-uranium-iran-disebut-bakal-capai-level-bom-nuklir</p>
<p>Variabel Terikat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan sanksi kembali 2. Destabilitas kawasan timur tengah 		<p>Trump mengumumkan penarikan AS dari <i>Joint Comprehensive Plan of Action</i> (JCPOA) atau perjanjian nuklir Iran pada Selasa, 8 Mei 2018, di Gedung Putih, Washington, D.C. Dengan mundurnya AS, Trump juga mengumumkan akan memberlakukan kembali sanksi pada sektor minyak Iran, yang telah dicabut sebagai bagian dari perjanjian.” Hal yang lebih buruk mungkin terjadi, dimana masyarakat internasional, baik organisasi negara maupun non-negara, akan berpikir dua kali untuk berkolaborasi atau membuat kesepakatan dengan AS. Dengan keluarnya AS dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi terhadap Iran, ketegangan</p>

		geopolitik akan muncul di Timur Tengah. https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/304/302
--	--	--

2.5 Skema Penelitian

